



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Pola Diplomasi Middle Power Indonesia dalam Meredam  
Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017***

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Amy Debora

2014330072

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Pola Diplomasi *Middle Power* Indonesia dalam Meredam  
Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017**

Skripsi

Oleh

Amy Debora

20143330072

Pembimbing

Idil Syawfi S.IP, M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Amy Debora  
Nomor Pokok : 2014330072  
Judul : PolaDiplomasi *Middle Power* Indonesia dalam Meredam Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 23 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amy Debora  
NPM : 2014330072  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Pola Diplomas *Middle Power* Indonesia dalam  
Meredam Eskalasi Konflik Laut China Selatan  
Tahun 2014-2017.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Agustus 2018



Amy Debora

## ABSTRAK

Nama : Amy Debora  
NPM : 2014330072  
Judul : Pola Diplomasi *Middle Power* Indonesia dalam Meredam  
Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola diplomasi Indonesia dalam meredam eskalasi konflik Laut China Selatan (LCS). Pola diplomasi tersebut selanjutnya akan membuktikan pola diplomasi Indonesia sebagai *middle power*. Eskalasi konflik LCS pada tahun 2014 mulai menghilangkan kepercayaan negara anggota ASEAN pada China. Di sisi lain, potensi eskalasi konflik LCS di Natuna secara tidak langsung juga menantang posisi Indonesia sebagai *non-claimant* dan *honest broker*. Penelitian ini akan menggunakan konsep *middlepowermanship* oleh Cooper, Hoggat dan Nossal (1990) untuk membahas diplomasi yang dilakukan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tetap melakukan diplomasi proaktif dalam meredam konflik LCS yaitu dengan cara mengembalikan rasa percaya negara anggota ASEAN pada China dan kembali menjembatani hubungan ASEAN, China dan AS baik secara langsung maupun dalam kerangka ARF. Indonesia juga memperlihatkan keaktifannya dalam membentuk norma kawasan sesuai dengan kepentingannya yang disertai dengan penguatan militer di Natuna sebagai implementasi Kebijakan Poros Martim Dunia.

Kata Kunci : *middlepowermanship*, Indonesia, Laut China Selatan, ASEAN, *coalition building*, *balancing*, keamanan kolektif.

## **ABSTRACT**

*Name* : Amy Debora

*NPM* : 2014330072

*Title* : *Indonesia's Middle Power Diplomacy in Reducing South China Sea Tensions (2014-2017)*

---

*This study aims to explain the pattern of Indonesian diplomacy in reducing the escalation of the South China Sea (SCS) conflict. The diplomacy pattern will further prove the pattern of Indonesian diplomacy as a middle power. On the other hand, the conflict escalation in Natuna automatically challenges Indonesia's position as a non-claimant and honest broker. This research will use the concept of middlepowermanship by Cooper, Hoggat and Nossal (1990) to discuss Indonesia's middle power diplomacy in, reducing conflict and maintaining its role as coalition and bridge builder between ASEAN, China and the US. The study found that Indonesia continues its proactive middle power diplomacy and build its military power in Natuna as the implementation of its Global Maritime Axis Policy.*

**Kata Kunci** : *middlepowermanship, Indonesia, South China Sea, ASEAN, coalition building, balancing, collective security*

## KATA PENGANTAR

Isu konflik Laut China Selatan (LCS) sudah sangat banyak di teliti oleh akademisi, dari berbagai sudut pandang. Pasca eskalasi konflik LCS yang ditunjukkan dengan ambisi maritim China tahun 2012, Indonesia menyadari adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan jika Indonesia tetap ingin menunjukkan *stance* sebagai *honest broker*. Mengklaim dirinya sebagai *middle power*, Indonesia pun membangun pola diplomasi dengan berbagai pertimbangan kepentingan, termasuk untuk mencapai fokus pembangunan nasional di bawah Jokowi yang bergantung pada China. Dengan pola diplomasi ini, Indonesia mencoba mengakomodasi kepentingan berbagai pihak untuk stabilitas kawasan dan keamanan kolektif. Penelitian ini menggambarkan pola diplomasi *middle power* tersebut dalam meredam eskalasi konflik LCS.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, mengingat tahun penelitian yang hanya berjarak 3 tahun dan terbatasnya data yang didapatkan. Untuk itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang lebih mendalam dikemudian hari.

Penulis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Tuhan Yesus** yang selalu punya cara untuk membuat saya tersenyum melalui *support* dan bantuan orang-orang hebat di bawah ini. *Thank you for lifting me up due time. I know it is You, Father and this is for You.*

**Papa Mama**, *main support system* yang selalu percaya dengan mimpi-mimpi saya. Terima kasih untuk papa yang sering menemani di *coffee shop* dan mama yang selalu menyambut dengan pelukan dan teh hangat. *This is for you!*

**Mas Idil Syawfi**, selaku pembimbing terbaik sejagad raya. Maaf Mas saya menghilang 3 bulan, kurang ajar, banyak tanya dan mepet. Saya akan selalu ingat kata-kata Mas “Kamu mau sidang semester ini? Oke, kita kejar sama-sama.” *Thank you for guiding me along the way and making my thesis defense possible.*  
Tuhan berkati Mas dan keluarga.

**Tom Odell dan Vance Joy** dan 2 albumnya, terutama lagu *Grow Old With Me* dan *Mess is Mine* yang diputar hampir pada setiap baris kalimat penulisan skripsi ini.

**Jessy Josephine**, *speechless!* Kita sudah sarjana Jes.

**Sherly Mega Putri**, dari Osfak, HMPSIHI, PSC, PMKT, prakdip, magang, seminar dan skripsi. *I couldn't ask God for a better the flash bringing, the sash wringing, trash singing, mass flinging, the hash slinging slasher sister!*

**Jennifer Kencana, Debora Kristiana, Sherly Mega Putri, Feby Elvany**, *girls*, at least we got something that makes goodbye really hard. *Te amo mi nina. Thank you for making Ciumbuleuit a home for these past 4 years.*

*Kak Ely Sesoría*, diplomat panutan saya. Terima kasih sudah membantu hingga segalanya jadi lebih mudah. Saya janji mengikuti jejak kakak *one way or another*.

*Kemlu RI, Kerja Sama Ekonomi ASEAN. Mas Fajar, Pak Anto, Mas Adiganteng, Mba Shirley, Mba Putri, Mba Mardy* yang membuat saya ingin cepat lulus.

*Bapak Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati*, terima kasih untuk diskusi sesuai *conference* yang sangat membantu saya dalam penulisan ini.

*Delegasi the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, M. Ali Tanthowi, Ari Budi, Sherly Mega Putri. Jangan lupakan perbuatan nakal kita di Nalendra, sebuah aib bangsa. ‘*Yukei foto yuk!*’

*Coffee Cult, baristanya dan asisten baristanya, Khalif, Odri, Ikiw, Abas, Avila, Sultan, Caesar*, Walaupun saya jadi perokok pasif tapi terima kasih sudah menemani perkembangan bayi ini selama 6 bulan dan membuat saya tidak *stress* dan lebih bahagia.

*RT 1 RW 5 Gang Pejambon 5, Aldy Tririfky, Grace Jessy, Kevin Ferianne*, yang sudah membuat saya bertahan hidup di Kemlu. Kalau nanti sudah punya *Camry* hitam plat RFS jangan korupsi migas ya daks. Semangat dy, saya ingin kamu pakai selempang ahli hukum secepatnya!

*Fondasi KSMPMI dan Humas KSMPMI 15/16 dan 16/17, it's a pleasure to work with you all*. Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat. *Anyway* selamat menikmati hari-hari di kampus tiga adik-adikku Esther, Kathleen, Robby, Ignas,

Igels, Rara, Devira, Aisha, Bella, Wibi, Aufar, Baseloy, Defe, Flo, Joe, Jo, Vena, Miftah, Kiki, Salman, Stefanie, Togu, Tracy, Via, Helmi, Petra, Meitania, dan Alifa.

*Farhan Yunas*, untuk semua *must-have website* yang sekarang saya tahu. *Alya Atila*, untuk contoh draft hijau yang kamu berikan ; *Awan*, karena sudah meminjamkan *flashdisk* yang sangat saya butuhkan ; *Aryo*, lo tau jasa lo sangat besar. *Ghina Nabila*, *Berlinda Nefertiti*, untuk *confidence-building* yang diberikan sebelum menghadapi Mas Idil pada awal penulisan skripsi serta contoh *slide* sidang dan banyak *e-mail* lainnya. *Olivia*, untuk makan siang yang kamu belikan pada H-1 pendaftaran sidang. *Maria*, terima kasih tolak angin dan vitamin C saat saya benar-benar drop. *Manda*, untuk lembar pengesahan dan semua keluhan yang kita keluhkan hingga H-1 daftar wisuda. *Eja*, yang sudah merapikan daftar isi dan *page break* saya ketika saya terlalu *hectic* dan tidak bisa berpikir. *Ola*, untuk menemani saya menonton James Bay, *Jeje*, untuk kost setiap waktu.

*Maria Mediatrix*, *Adriana Anjani*, *Celica Aoi Andini*, *Thalia* , *Tiara Citranda*, *Jovita Nathania*, *Jessica Juliana*, *Trifitri Muhammaditta*, *Athaya Maulina*, *Shasta Kirana*, *Debora Magdalena*, *Keshia Aferina*, *Febrianthi Pingkan*, *Fahrizal*, *Tiomas*, *Leonora Agatha*, , *Teman-teman PSM UNPAR 2014*, *Teman-teman PMK 1 UNPAR*, *Esther Yolanda*, *Kezia Ezekiel*, *Eliana Esperanza*, *Yefune*, *Aliaviona Tesalonika* dan *Rina Elizabeth*, untuk doa, *support* dan kasih yang membuat hidup saya berwarna. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada sidang saya.

*L, for once again making me believe there will be a man outthere who's very kind and reliable. He fears of the Lord, serves the church also at the profesional level. He carries on God's vision in his back and walks in that path. And, He loves me.*

*For my eyes have seen Your salvation, o Lord.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah .....	4
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	6
1.2.3 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1 Kajian Literatur .....	7
1.4.2 Kerangka Pemikiran .....	10
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
1.5.1 Metode Penelitian.....	17
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.6 Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB 2 ESKALASI DAN KONSTELASI POLITIK LAUT CHINA SELATAN 20</b>	
2.1 Sengketa Wilayah LCS .....	20
2.2 Kepentingan China di LCS dan Ambisi Maritim Pemerintahan Xi Jinping.....	22
2.3 Peranan dan Posisi Dasar Aktor Berkepentingan .....	26
2.4 Indonesia dan Potensi Eskalasi Konflik LCS di Natuna .....	34
2.4.1 Ancaman Terhadap Keamanan Maritim di Natuna.....	34
2.4.2 Indonesia Merespon .....	38

2.4.3	Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia.....	39
2.4.4	Posisi Dasar Indonesia dalam Isu Konflik Laut China Selatan .....	42
<b>BAB 3 INDONESIA SEBAGAI <i>MIDDLE POWER</i> .....</b>		<b>44</b>
3.1	Status <i>Middle Power</i> Indonesia .....	44
3.2	Indonesia sebagai <i>Coalition Builder</i> .....	45
3.2.1	Kerja Sama Trilateral untuk Memperkuat ASEAN dan Menyuarakan Kesepahaman Mengenai Keamanan Kolektif.....	46
3.3	Indonesia sebagai <i>Bridge Builder</i> .....	51
3.3.1	ASEAN Regional Forum sebagai Cara Indonesia Membangun Kepercayaan ASEAN pada China .....	52
3.3.2	<i>Honest Broker</i> .....	56
3.4	Norms Entrepreneur .....	57
3.5	Peningkatan Keamanan Natuna di Bawah Kerangka <i>Niche Diplomacy</i> .....	61
<b>BAB 4 KESIMPULAN .....</b>		<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta China <i>National Boundaries</i> yang sudah diperbaharui .....	34
2.2	Posisi Natuna dalam Peta Laut China Selatan .....	35

## DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Buah Kapal
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Countries</i>
AL	Angkatan Laut
AMM	<i>ASEAN Foreign Ministers Meeting</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ARF	ASEAN Regional Forum
Bakamla	Badan Keamanan Laut
CCG	<i>Chinese Coast Guard</i>
COC	<i>Code of Conduct</i>
DOC	Declaration of Conduct
G20	<i>Group of Twenty</i>
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KRI	Kapal Perang Republik Indonesia
LCS	Laut China Selatan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemri	Pemerintah Republik Indonesia
PLAN	<i>People's Liberation Army Navy</i>
RI	Republik Indonesia
SAMs	<i>Surface Air Missile System</i>
VBSS	<i>Visit Boat Search and Seizure</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perumusan politik luar negeri didominasi oleh pertimbangan faktor letak geografis dan *power* negara dalam sistem internasional. *Power* yang dimiliki negara akan mendasari posisi politik luar negerinya dalam menghadapi ketidakpastian politik internasional, menjadi pedoman yang mengatur hubungan antar negara, hingga menunjukkan posisi negara dalam isu-isu internasional serta kerja sama maupun konflik. Bagi Indonesia, pedoman ini juga yang mendasari tindakan Indonesia dalam merespon konflik Laut China Selatan yang menjadi sengketa wilayah terbesar di kawasan Asia Tenggara dan melibatkan kepentingan negara-negara eksternal lainnya.<sup>1</sup>

Laut China Selatan (Mandarin = *Nan Nai*) terbentang dari Selat Taiwan yang berada di Laut Timur China hingga bagian utara Selat Karimata, Indonesia. Perairan ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 100 mil yang juga berbatasan dengan zona teritorial Taiwan dan 8 (delapan) negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Robert W. Cox, "Middlepowermanship, Japan and Future of World Order," *International Journal* 44, no. 4 (1989): 823–62, diunduh dari <https://doi.org/10.2307/40202638>.

<sup>2</sup> David Rosenberg, "Governing the South China Sea: From Freedom of the Seas to Ocean Enclosure Movements," *Harvard Asia Quarterly* XII, no. 3 & 4 (2010): 5, diakses pada 8 Maret 2018, [http://www.southchinasea.org/files/2013/02/Governing\\_The\\_South\\_China\\_Sea.pdf](http://www.southchinasea.org/files/2013/02/Governing_The_South_China_Sea.pdf).

LCS memiliki nilai perdagangan internasional tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahun dan cadangan gas alam hingga 190 triliun kaki kubik.<sup>3</sup> Berada di jantung jalur navigasi Eropa-Asia, LCS dilewati lebih dari separuh keseluruhan kapal dagang dunia setiap tahunnya. Tidak hanya itu, minyak yang didistribusikan dari Selat Malaka, Selat Karimata dan Samudera Hindia (melewati LCS) menuju Asia Timur berjumlah 3 kali lipat lebih besar dari minyak yang melewati Terusan Suez dan 15 kali lipat dari jumlah minyak yang melintasi Terusan Panama.<sup>4</sup>

Fakta ini memicu kepentingan geopolitik China untuk mengamankan akses jalur pelayarannya dengan melakukan klaim sepihak atas LCS yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Taiwan. Hingga tahun 2012, China di bawah pemerintahan Hu Jintao seakan mengurangi tensi atas klaimnya di LCS. Pada pemerintahan Hu, China memfokuskan pembangunan kekuatan armada lautnya dengan meningkatkan biaya anggaran militer sebesar 11,2% menjadi 670,27 miliar yuan atau sekitar 965 triliun rupiah.<sup>5</sup> Ini berarti China hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer Amerika Serikat, membuat posisi *bargaining power* yang tinggi di dunia

---

<sup>3</sup> Evan Hardoko, "Laut China Selatan Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara," KOMPAS, 13 Juli 2016, diakses pada 29 September 2017, <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>.

<sup>4</sup> Robert D. Kaplan, "Why South China Sea is so Crucial", *Business Insider* (20 Februari 2015), diakses pada 13 Oktober 2017, <https://www.businessinsider.com.au/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2>.

<sup>5</sup> Andrew Erickson, "China's Maritime Ambition," dalam *The Routledge Handbook of Asian Security Studies*, Second Edition (New York: Routledge, 2017), 100–114.

internasional dan dianggap mampu mengimbangi pengaruh AS.<sup>6</sup> Di sini, China menunjukkan potensi dirinya sebagai *great power*.

Pada saat Xi Jinping menduduki kursi pemerintahan tahun 2012, proyeksi kekuatan militer China pun terlihat. China mulai mereklamasi pulau-pulau tak berpenghuni di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel dan membangun basis militer di atasnya. Bersamaan dengan itu, Kamboja dalam dialog-dialog ASEAN menolak membicarakan militerisasi kawasan oleh China. Kamboja menyatakan bahwa LCS murni merupakan masalah kedaulatan, sehingga penyelesaiannya harus melalui dialog bilateral antara China dan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Sikap pasif dalam diplomasi penyelesaian sengketa juga diperlihatkan Brunei Darussalam yang kurang menginisiasi solusi penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, China juga menerbitkan peta wilayah nasional yang sudah diperbaharui dan menyatakan bahwa China dan Indonesia memiliki area tumpang tindih di ZEE RI di Laut Natuna.<sup>8</sup> Ini memperlihatkan bahwa China seakan membuka sengketa wilayah baru dengan Indonesia, apalagi dilanjutkan dengan kedatangan *Chinese Coast Guard* (CCG) ke Laut Natuna yang melanggar domain kedaulatan NKRI.<sup>9</sup> CCG ini juga mengawal kapal nelayan China yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Filipina dan Vietnam. Hal ini memicu

---

<sup>6</sup> Lisbet, "Peningkatan Kekuatan Militer China," *Info Singkat Hubungan Internasional IV*, no. 05 (Maret 2012): 5–8.

<sup>7</sup> Dr. Mishra Rahul, "Cambodia : China's Special Partner," Indian Council of World Affairs, 15 Maret 2016, <https://icwa.in/pdfs/VP/2014/CambodiaChinaSpecialPartnerVP14032016.pdf>.

<sup>8</sup> "Annoyed in Natuna; Indonesia and the South China Sea," *The Economist*, 2 Juli 2015, <https://bit.ly/2nkYbjd>.

<sup>9</sup> Joe Cochrane, "China's Coast Guard Rams Fishing Boat to Free It From Indonesian Authorities," *The New York Times*, 21 Maret 2016, <https://www.nytimes.com/2016/03/22/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing-boat.html>.

kemarahan terutama bagi Filipina dan Vietnam yang langsung menyatakan China telah mengganggu stabilitas kawasan dan mempersulit dialog penyelesaian sengketa yang sedang berjalan.<sup>10</sup> Filipina dan Vietnam pun kembali mendekati AS dan melakukan penguatan pakta pertahanan sebagai respon akan pembangunan infrastruktur militer di Spratly yang dilakukan China.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Eskalasi konflik ini menciptakan ketegangan di kawasan dan membuat posisi Indonesia sebagai *non-claimant* dan *honest broker* menjadi sulit. Apalagi Beijing menghimbau Jakarta untuk melakukan penyelesaian klaim tumpang tindih di wilayah Natuna secara bilateral.<sup>11</sup> Tidak hanya menciptakan dilema keamanan kawasan, eskalasi konflik membuat beberapa negara anggota ASEAN menyangsikan itikad baik China dalam dialog penyelesaian konflik yang sedang berjalan. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan negara anggota ASEAN dalam menanggapi China dan keengganan negara anggota ASEAN membahas isu politik dan militerisasi LCS dalam dialog-dialog ASEAN sejak tahun 2014.<sup>12</sup>

Indonesia memang bukan *claimant*, tapi *stance* Indonesia penting sebagai penentu arah politik dan konflik LCS.<sup>13</sup> Untuk itu, Indonesia perlu bertindak tepat untuk meredam eskalasi konflik sesuai dengan perannya di kawasan. Menanggapi

---

<sup>10</sup> Aileen S. P. Baviera, "South China Sea disputes : Why ASEAN must Unite?," East Asia Forum, 26 Juli 2012, <http://www.eastasiaforum.org/2012/07/26/south-china-sea-disputes-why-asean-must-unite/>.

<sup>11</sup> "Jakarta Lacks Pragmatism at Sea," China Daily, Juni 2016, diakses pada 18 Februari 2018, [http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2016-06/23/content\\_25814412.htm](http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2016-06/23/content_25814412.htm).

<sup>12</sup> Baviera, "South China Sea disputes : Why ASEAN must Unite?," *op.cit.*

<sup>13</sup> Patharapong Rattanaseevee, "Leadership in ASEAN : The Role of Indonesia Reconsidered," *Asian Jurnal of Political Science* 22, no. 2 (2014): 113–27.

ketegangan antara militer China, Filipina dan Vietnam, Indonesia pun mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mudah terprofokasi. Menanggapi pernyataan China mengenai adanya tumpang tindih kedaulatan di ZEE RI di Natuna, Indonesia memastikan bahwa China-RI tidak memiliki sengketa maritim apapun dan ZEE RI di Natuna adalah murni kedaulatan Indonesia.

Indonesia pun menyatakan sekali lagi, konsistensi posisinya di LCS sebagai berikut 1) Indonesia mendukung penyelesaian sengketa secara damai, menghormati hukum internasional dan proses diplomatik. 2) Menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk sentralitas dan kesatuan anggotanya dalam penyelesaian sengketa. 3) Mendorong ASEAN dan China untuk menjaga perdamaian, memastikan keamanan maritim, menghormati kebebasan navigasi dan penerbangan dan non-militerisasi kawasan. 4) Mengajak pihak bersengketa untuk menahan diri. 5) Tetap menjalankan peran sebagai *honest broker*.<sup>14</sup>

Menanggapi *stance* negara anggota ASEAN yang berbeda-beda dalam menanggapi China, Indonesia memulai diplomasi untuk kembali membangun koalisi informalnya. Indonesia menyuarakan keamanan kolektif, di mana perlunya kerja sama negara anggota ASEAN untuk menjaga keamanan maritim untuk kepentingan bersama. Bagi Indonesia, penguatan diplomasi ASEAN diperlukan untuk menyeimbangi China karena bantuan keamanan AS ditakutkan akan menciptakan *arms race* di kawasan yang tidak diinginkan Indonesia.<sup>15</sup> Konsistensi posisi dasar dan diplomasi Indonesia setidaknya mampu meredam ketegangan

---

<sup>14</sup> Tim Posisi Dasar BPPK Kemlu, *Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2016* (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, 2016), 403-404.

<sup>15</sup> Baviera, "South China Sea disputes : Why ASEAN must Unite?", *op.cit.*

negara-negara pesisir LCS, mencegah potensi eskalasi konflik LCS di Natuna serta mengembalikan fokus negara *claimant* untuk menyelesaikan konflik lewat dialog.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada diplomasi Indonesia di LCS tahun 2014 hingga 2017 pada era pemerintahan Joko Widodo. Tindakan dan pola diplomasi Indonesia ini juga dibatasi dengan karakteristik politik luar negeri berdasarkan konsep *middle power* oleh Cooper, Higgot dan Nossal. Pola diplomasi ini nantinya akan menunjukkan pola diplomasi Indonesia sebagai *middle power* di kawasan.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut : **Bagaimana pola diplomasi Indonesia dalam meredam eskalasi konflik LCS tahun 2014-2017?**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan menggambarkan pola diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk meredam eskalasi konflik LCS tahun 2014 hingga 2017. Pola diplomasi tersebut akan memperlihatkan pola diplomasi *middle power* Indonesia.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai syarat lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini juga dilakukan untuk melatih kemampuan penggunaan teori dan kemampuan analisis penulis. Bagi pembaca, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memberi sudut pandang berbeda dari konflik LCS yaitu bagaimana Indonesia melakukan diplomasi *middle power* untuk meredam eskalasi konflik. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian akademis yang akan dilakukan selanjutnya.

## **1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kajian Literatur**

Penelitian mengenai diplomasi *middle power* Indonesia dalam dialog penyelesaian konflik LCS sudah cukup banyak dibahas oleh akademisi dalam berbagai literatur dengan berbagai sudut pandang. Literatur pertama yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah tulisan dari Dr. I Nyoman Sudira. Tulisan ini membahas adanya kepentingan AS dan Uni Eropa (UE) di LCS dan bagaimana politik luar negeri Indonesia harus menanggapi. Menurut literatur ini, strategi AS yang mulai melihat ke Asia Pasifik harus dimanfaatkan oleh Indonesia yang sedang memimpin ASEAN untuk dapat menyelesaikan sengketa teritorial dengan jalur damai. Nilai-nilai penyelesaian konflik seperti kepatuhan terhadap hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai dianut oleh RI dan AS. Sehingga kedua negara diharapkan mampu bekerja sama untuk mengupayakan

penyelesaian sengketa teritorial ini. PLN Indonesia pun harus mampu merangkul AS dan memanfaatkan kontribusinya bagi penanganan konflik LCS.<sup>16</sup>

Literatur selanjutnya berjudul Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pengamanan Perairan Natuna Pasca-Keputusan Arbitrase Internasional oleh Erlinda Matondang. Matondang menjelaskan bahwa Indonesia adalah penentu konstelasi politik di LCS, untuk itu Indonesia harus menjaga posisi dasarnya di LCS, walaupun tetap disertakan penguatan militer di Natuna. Menanggapi eskalasi konflik, Indonesia perlu mengambil peran untuk kembali menyatukan suara ASEAN dalam menghadapi China. ASEAN yang bersatu akan memudahkan pembahasan *code of conduct* LCS dengan China. Berbeda dengan tulisan sebelumnya, literatur ini memandang bahwa strategi *military balancing* China dengan merangkul AS akan menyulitkan peredaman konflik. Indonesia perlu merangkul koalisi informalnya yaitu ASEAN sebagai *normative balancing* terhadap China.<sup>17</sup>

Literatur ketiga merupakan jurnal berjudul *Leadership in ASEAN : The Role of Indonesia Reconsidered* yang merupakan tulisan Pattharapong Rattanasevee. Literatur ini menjelaskan bahwa dalam organisasi kawasan diperlukan adanya kepemimpinan negara untuk membangun komitmen regional dan arah diplomasi organisasi tersebut, begitu juga dengan ASEAN.<sup>18</sup> Namun

---

<sup>16</sup> I Nyoman Sudira, "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa," *Universitas Katolik Parahyangan* 10, no. 2 (2014).

<sup>17</sup> Fenyó Marton, "The Foreign Policy of Indonesia In Light of President Jokowi's 'Visi-Misi' Program" (Plazmany Peter Catholic University, 2015), [https://btk.ppke.hu/uploads/articles/554378/file/Feny%C5%91%20M%C3%A1rton\\_Szakdolgozat\\_MA\\_2015.pdf](https://btk.ppke.hu/uploads/articles/554378/file/Feny%C5%91%20M%C3%A1rton_Szakdolgozat_MA_2015.pdf).

<sup>18</sup> Rattanasevee, "Leadership in ASEAN : The Role of Indonesia Reconsidered", *op. cit.*

tulisan ini tidak percaya akan adanya *single leader*, tapi dibutuhkan adanya *coalition leader*. Jika Indonesia sudah memiliki pandangan, norma dan arah diplomasi bagi kawasan, sebaiknya Indonesia mencari negara yang memiliki pemikiran yang sama (*like-minded state*) untuk bekerja sama.<sup>19</sup> Dua hingga tiga negara yang bekerja sama dengan pandangan atau norma yang sama akan menjadi model bagi negara lain untuk mengikuti pola kerja sama tersebut dan mengikuti norma yang diinginkan Indonesia.

Literatur terakhir yang menjadi acuan utama adalah tulisan Aaron Connely yang berjudul *Indonesia di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri*. Tulisan ini memperlihatkan bahwa China terlalu penting bagi Indonesia apalagi dengan visi Poros Maritim Dunia, China merupakan mitra investasi utama Indonesia. Karenanya, Indonesia pada era Jokowi sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan rasa tidak senang China.<sup>20</sup> Di awal pemerintahannya Jokowi juga menarik diri dari diplomasi proaktifnya di kawasan. Tulisan ini memperlihatkan kini Indonesia bersifat *inward-looking* dan insiden Natuna menjadi alarm pemerintah untuk lebih tegas dalam mengamankan batas wilayah. Penyelesaian konflik LCS yang berlarut-larut dan tidak berujung menjadi alasan Jokowi untuk menarik diri dari kepemimpinannya dalam penyelesaian konflik. Menjaga hubungan baik dengan China juga merupakan hal penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur Indonesia.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Aaron L. Connely, "Indonesia di Laut Cina Selatan Berjalan Sendiri," Lowy Institute for International Policy, 5 April 2017, <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-laut-cina-selatan-berjalan-sendiri>.

Literatur di atas menunjukkan masih adanya perdebatan antara akademisi bagaimana strategi diplomasi Indonesia pasca adanya eskalasi konflik LCS. Dalam penelitian ini, penulis akan menekankan kepada pola diplomasi *middle power* Indonesia yang menyatukan semua elemen kepentingan dan tetap konsisten dengan perannya memimpin ASEAN serta menjembatani ASEAN dan China. Indonesia tetap melihat China sebagai mitra dan ASEAN sebagai soko guru diplomasi Indonesia. Selain itu, penulis menganggap Indonesia tidak menginginkan adanya campur tangan AS di dalam konflik LCS. Untuk itu Jakarta menunjukkan perannya sebagai *middle power* dan menunjukkan kapabilitas dalam memimpin dialog penyelesaian konflik. Hal ini dilakukan karena jika AS masuk ke dalam penyelesaian konflik ditakutkan LCS menjadi wilayah *arms race* antara 2 kekuatan besar yaitu AS dan China dan justru akan menciptakan dilema keamanan baru. Untuk itu, tulisan ini lebih menekankan kepada cara Indonesia merangkul ASEAN dan China untuk kembali kepada dialog penyelesaian sengketa yang sedang berjalan dan menghilangkan rasa saling curiga. Indonesia dalam hal ini juga menyebarkan nilai/norma yang harus dijunjung bersama sebagai bentuk perwujudan keamanan kolektif.

#### **1.4.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan konsep *middle power* oleh Andrew F. Cooper, Richard A. Higgot dan Kim R. Nossal pada tahun 1993. Cooper, Higgot dan Nossal menjelaskan bahwa pertimbangan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi kepentingan nasional dan cara negara memandang *power* yang

dimilikinya.<sup>21</sup> *Power* dalam hubungan internasional diartikan sebagai kekuatan sebuah negara dan merupakan kepercayaan kolektif negara dalam memandang dirinya sebagai entitas.<sup>22</sup> Menurut Cooper, Higgot dan Nossal *power* suatu negara dapat dilihat dari sudut pandang status dan peran.<sup>23</sup>

*Power* sebagai status dilihat dari kapasitas negara yang bersifat material seperti letak geografis, kekuatan militer, produk domestik bruto dan populasi penduduk. Namun perlu diingat tidak ada formula untuk mengukur *power* sebagai status, keempat kapasitas tersebut hanya menunjukkan indikator yang disetujui dalam melihat kekuatan nasional dan bukanlah variabel yang pasti.<sup>24</sup> Sedangkan *power* sebagai peran dilihat dari kapasitas negara dalam melakukan perannya pada level internasional dan dalam berdiplomasi.

Status dan peran ini diperjelas oleh Faisal Karim dalam tulisan yang berjudul *Middle Power, Status Seeking and Role Conceptions : The Cases of Indonesia and South Korea*. Karim memperkenalkan apa yang disebut *potential power* (status) dan *actual power*. *Potential power* (status) menjelaskan faktor-faktor materi yang dimiliki negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya sedangkan *actual power* adalah kemampuan negara untuk mentransformasikan

---

<sup>21</sup> Andrew F. Cooper, Richard A. Higgot, dan Kim R. Nossal, *Relocating Middle Powers : Australia and Canada in Changing World Order* (Vancouver: University of British Columbia Press, 1993).

<sup>22</sup> Moch Faisal Karim, "Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea," *Australian Journal of International Affairs*, 13 Maret 2018, 1–21, diunduh dari <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> D. Baldwin, "Power Analysis and World Politics : New Trends versus Old Tendencies," dalam *World Politics*, vol. 31, 2, 1979, 161–94.

*potential power* ke dalam perilaku diplomatik yang nantinya akan menunjukkan karakteristik politik luar negeri negara tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan statusnya, negara-negara di dunia terbagi menjadi *great power*, *middle power*, dan *small power*. Jika *great power* memiliki kapasitas militer yang kuat dan aktivitas ekonomi yang maju, maka *middle power* memiliki kekuatan militer yang cenderung lemah dan ekonomi yang masih berkembang. Karakteristik utama politik luar negeri *middle power* yaitu pertahanan terhadap *status-quo* yang ada dan menjaga hubungan antara *great power* dan *small power*.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan iklim investasi yang dibutuhkan *middle power* bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Pertimbangan antara kekuatan nasional dan kepentingan nasional pun menyebabkan *middle power* memiliki karakteristik yang unik dalam menjalankan politik luar negerinya yaitu melalui '*middlepowermanship*'. *Middlepowermanship* merupakan strategi diplomasi *middle power* untuk memainkan peranan maksimal pada skala internasional melalui institusi atau rezim internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>27</sup> Pola diplomasi ini biasanya akan dinyatakan secara formal oleh rezim pemerintahan sebuah negara.

Pada dasarnya *middlepowermanship* didorong oleh nilai *good international citizenship* di mana negara mencoba mencari solusi bersama untuk

---

<sup>25</sup> Karim, "Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea", *op. cit.*

<sup>26</sup> Cooper, Higgot, dan Nossal, *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in Changing World Order*, *op. cit.*

<sup>27</sup> Cox, "Middlepowermanship, Japan and Future of World Order", *op. cit.*

kepentingan kolektif. Hal inilah yang mendasari karakteristik utama pola diplomasi *middle power* yang mengejar solusi multilateral dalam menangani isu internasional serta melakukan kompromi kepentingan dalam sengketa untuk menunjukkan nilai *good international citizenship* itu sendiri.<sup>28</sup> Berdasarkan dasar nilai ini, Cooper, Higgot dan Nossal menyebutkan 4 (empat) karakteristik politik luar negeri utama *middle power*.

Karakteristik yang pertama adalah *coalition building*. Tindakan *middle power* memiliki tendensi untuk mereduksi konflik. Untuk itu, *middle power* biasanya menempatkan diri sebagai aktor yang menginisiasi penyelesaian konflik, bahkan jika *middle power* tersebut tidak terlibat langsung dalam sengketa. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan *middle power* tidak akan memberi ancaman terhadap *status-quo*, sehingga peran inisiator ini dilakukan dengan cara yang unik. *Middle power* akan melibatkan negara-negara non-*middle power* yang memiliki pandangan yang sama akan konflik tersebut (*involving like-minded states*).<sup>29</sup> Hal ini dilakukan agar kompromi kepentingan dapat diterapkan bersama. Pendeknya, *middle power* akan membangun koalisi untuk mengikuti sikap yang diambil *middle power* akan suatu isu internasional. Harus ditekankan bahwa koalisi yang dibangun oleh *middle power* merupakan koalisi informal, artinya koalisi tidak mengikat dan tidak didasari pakta

---

<sup>28</sup> Cooper, Higgot, dan Nossal, *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in Changing World Order*, *op. cit.*

<sup>29</sup> Eduard Jordaan, "The Concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers," *Politikon: South African Journal of Political Studies* 30, no. 1 (2003): 165–81, diunduh dari <http://dx.doi.org/10.1080/0258934032000147282>.

pertahanan tapi menekankan pada kesamaan *stance* dalam dialog yang akan dilakukan.

Eduard Jordaan membedakan karakteristik koalisi yang dibangun oleh *traditional middle power* dan *emerging middle power*. Saat *traditional middle power* lebih percaya diri dalam menyatakan *stance*-nya sendiri lewat dialog multilateral, *emerging middle power* memiliki orientasi regional yang sangat tinggi.<sup>30</sup> Hal ini dilakukan agar *stance* dinyatakan sebagai *stance* bersama dari negara-negara satu kawasan. Dengan kata lain, *emerging middle power* akan membangun koalisi informalnya lewat memimpin penguatan organisasi kawasannya.

Karakteristik yang kedua adalah *middle power* menempatkan diri sebagai *bridge builder*. Dalam kondisi konflik kepentingan antara *great power* dan *small power*, *middle power* akan berperan dalam menjembatani dialog antara kedua kekuatan tersebut. Peran sebagai *bridge builder* dilakukan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, *middle power* menyadari adalah perbedaan kepentingan antara *great* dan *small power* dan pandangan *small power* terhadap *great power* yang cenderung negatif. Kedua, *small power* memiliki kemampuan negosiasi yang cenderung lemah terutama dalam posisi tawar-menawar.<sup>31</sup> Untuk itu, dalam menjaga *status-quo*, *middle power* perlu memastikan *small power* mampu bernegosiasi dengan kekuatan besar, sekaligus memastikan *great power* dapat

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Chaewkang You, "Middle Powers, Norms, and Balancing: ROK's and ASEAN Normative Balancing Against Rising China," 2016, <http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/af8c46fb-30e2-4b6e-8aff-d4d36e0906dc.pdf>.

meredam ambisinya di kawasan.<sup>32</sup> Bagi *middle power*, adanya dialog dan akomodasi kepentingan antara kedua kekuatan menyebabkan sistem internasional yang lebih seimbang dan dapat diprediksi.

Penyeimbangan ini tidak dilakukan dengan penguatan aliansi militer untuk mengkonfrontasi *great power*. Tapi dilakukan dengan sebuah *framework* yang dinamakan *normative balancing*. Asumsi utama dari *framework* ini adalah *middle power* dan *small power* perlu melakukan *balancing* terhadap *great power* tapi bukan melalui penguatan militer namun melalui norma sebagai alat untuk mencegah ancaman hegemoni kawasan. Penyeimbangan secara normatif ini menekankan pada bagaimana negara *small power* dapat memiliki kemampuan negosiasi dengan *great power* sehingga *great power* juga dapat melihat adanya kekuatan organisasi regional dan tidak bermain-main dengan kekuatan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, dengan berperan sebagai *bridge builder* pula, *middle power* bermaksud mengakomodasi kepentingan antar *great power* untuk menciptakan kawasan yang stabil. Dengan *bridge builder*, diharapkan adanya keterbukaan antara negara dan kepentingannya untuk menghilangkan rasa tidak percaya, serta mengubah konflik menjadi kerja sama yang didasari keamanan kolektif.

Karakteristik politik luar negeri *middle power* yang selanjutnya adalah *norms diffuser*. Dalam sistem internasional, norma-norma internasional biasanya dikonstruksikan oleh *great power* dan harus diikuti oleh negara-negara lainnya.

---

<sup>32</sup> Cooper, Higgot, dan Nossal, *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in Changing World Order*, *op. cit.*

*Great power*, di satu sisi memiliki kapasitas *think tank* untuk mencari solusi normatif untuk isu-isu internasional. Norma yang dibangun juga bertujuan mengamankan posisi *great power* dalam sistem internasional. Di sisi lain, *middle power* berkontribusi dalam mensosialisasikan norma tersebut untuk dapat diterima oleh *middle power* dan *small power*.<sup>33</sup> Kekuatan diplomasi *middle power* mampu menjembatani pandangan *small power* yang cenderung negatif terhadap *great power*. Dengan pendekatan yang dilakukan *middle power* terhadap *small power*, *middle power* membantu dalam pembuatan norma dan nilai yang diinginkan *great power* dan membuat norma tersebut menjadi terlihat seperti norma yang universal.

*Middle powers are eager and leading, participants in regional structure. Middle powers assist in making the ideology, values and practices of the hegemonic order that facilitate and mask global inequality appear more natural and universal norms.*<sup>34</sup>

Karakteristik yang terakhir adalah penerapan *niche diplomacy*. *Niche diplomacy* suatu negara berubah-ubah dari satu rezim ke rezim lainnya, sesuai dengan kondisi internasional dan domestik, serta kepentingan nasional. *Niche diplomacy* merupakan cara pemerintah suatu negara untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya pada satu bidang pembangunan nasional.<sup>35</sup> Bidang khusus ini yang akan mendasari diplomasi dan kerja sama negara tersebut dengan negara lain. Sehingga walaupun *middle power* memiliki kapasitas materi yang

---

<sup>33</sup> Cooper, Higgot, dan Nossal, *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in Changing World Order*, *op. cit.*

<sup>34</sup> Jordaan, "The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers", *op. cit.*

<sup>35</sup> Andrew F. Cooper, *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War* (New York: Macmillan, 1997).

kecil, *middle power* dapat memperlihatkan kekuatannya pada satu bidang pembangunan dan diplomasinya untuk pembangunan tersebut.<sup>36</sup>

Keempat pola diplomasi *middlepowermanship* di atas menggambarkan apa yang disebut oleh Parameswaran sebagai *influential medium-sized state*. Walaupun *middle power* tidak memiliki kapasitas militer dan ekonomi sebesar *great power*, namun *middle power* memiliki kapasitas negosiasi, *willingness* serta mengambil peran untuk menjalankan diplomasi proaktif dengan visi global serta menjembatani *developed* dan *developing world*.<sup>37</sup>

## **1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Metode Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pencarian data kualitatif. Penelitian kualitatif ini ditunjukkan dengan penjelasan yang berbentuk narasi deskriptif dan implementasi teori ditunjukkan dalam studi kasus.<sup>38</sup> Creswell menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk mengembangkan topik utama dari data-data yang ada, bukan hanya memaparkan dan menjelaskan data tersebut. Penelitian yang menggunakan metode ini juga pada umumnya membuat klaim atau pola berdasarkan persepsi penulis yang bersifat konstruktif, sehingga penulis dapat menyimpulkan dengan makna yang dibangun dari pemikiran penulis sendiri.<sup>39</sup> Hal

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Prashanth Parameswaran, "Between Aspiration and Reality : Indonesia Foreign Policy the 2014 Elections," *The Washington Quarterly* 37, no. 3 (10 November 2014): 153–65.

<sup>38</sup> John W. Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: Sage Publications, 2003).

<sup>39</sup> *Ibid.*

ini memungkinkan penulis memasukan intepretasi dan posisi penulis dalam menganalisis data yang ada.

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil data dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mencari data baik dari sumber primer, maupun sekunder. Sumber primer didapatkan dari pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan China yang dipublikasikan pada situs web kementerian luar negeri, *official report*, serta pidato presiden. Sedangkan sebagai data sekunder, penulis melakukan studi pustaka dan studi dokumen penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait posisi politik luar negeri Indonesia dalam konflik LCS, serta data-data dari surat kabar elektronik. Selain studi pustaka, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara.

Alan Bryman dalam buku *Social Research Methods* menjelaskan kerangka penulisan kualitatif. Dalam mencari data, pada penelitian kualitatif penulis mencari data yang penulis lihat relevan dengan teori dan analisa yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif memungkinkan besarnya faktor intepretasi pribadi penulis dalam melakukan analisa, memperlihatkan temuan dan memberikan konklusi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (New York: Oxford University Press, 2012).

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam 4 bab. Pada bab pertama, penulis memberikan pembahasan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran serta teknik pengumpulan data.

Pada bab selanjutnya, penulis memaparkan data mengenai konflik LCS dan ambisi maritim China yang menyebabkan eskalasi konflik pada tahun 2014, termasuk insiden bersenjata di Natuna. Penulis juga menjelaskan pandangan dan posisi dasar AS dan ASEAN di LCS yang nantinya menjadi pertimbangan pola diplomasi *middle power* Indonesia yang diambil.

Selanjutnya, penulis mengawali pembahasan pada bab 3 dengan memberi gambaran mengenai sumber-sumber *power* yang dimiliki Indonesia yang dilihat dari *power* sebagai status. Selanjutnya penulis membuktikan temuan penulis mengenai pola diplomasi Indonesia yaitu bagaimana peran Indonesia sebagai *coalition building*, *bridge builder*, *norms diffuser* serta bagaimana *niche diplomacy* dijalankan sebagai dasar strategi Indonesia akan pertahanan Natuna.

Sebagai penutup, penulis merangkum temuan-temuan dari penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah pada bab 4 serta menyimpulkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2017 Indonesia menjalankan pola diplomasi *middle power* dalam meredam eskalasi konflik Laut China Selatan